



Berkomitmen Dukung Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat

Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta Bahas Dua Raperda

JOGJA, Radar Jogja - DPRD Kota Yogyakarta melaksanakan paripurna, membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) pada Jumat (10/2). Raperda pertama yang dibahas berkaitan dengan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Marta dan Perusahaan Perseroan Daerah Yogyakarta Vishesha. Sementara raperda kedua membahas pencabutan

Perda Kota Yogyakarta No 10/2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta Dhian Novitasari. Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, DPRD Kota Yogyakarta mendukung upaya yang berdampak positif dan memiliki multiplier pada masyarakat. Oleh sebab itu, paripurna membahas pengembangan usaha milik Pemkot Yogyakarta, dalam upaya memberi pelayanan maksimal bagi masyarakat.

"Kondisi air di Kota Yogyakarta untuk konsumsi memang sudah



MAKSIMALKAN PELAYANAN: Rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta membahas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua raperda pada Jumat (10/2).

tidak layak. Banyak yang sudah tercemar bakteri Escherichia coli (e-coli)," ujarnya saat diwawancara *Radar Jogja*.

Paparan e-coli, membuat air tak layak konsumsi. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran kali dengan padat penduduk. "Kota Yogyakarta dilewati tiga kali besar, Gajahwong, Winongo, dan Code," jelasnya.

Dhian berharap, penambahan modal bagi PDAM Tirta Marta membuatnya lebih maksimal dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Sehingga seluruh masyarakat di Kota Pelajar men-

dapat akses air bersih layak konsumsi. "Terus terang, kami sering dapat aduan dari masyarakat, karena air kotor, keruh atau sempat macet," bebemnya.

Dhian pun berharap kawasan Yogyakarta selatan dapat berkembang, melalui penambahan modal bagi Yogyakarta Vishesha atau dikenal dengan XT Square. "Lokasinya di Umbulharjo, di tengah kota. Sebagai sentral bisnis atau penggerak ekonomi masyarakat. Jadi akan ada pemerataan ekonomi berbasis pariwisata yang bersinergi dan linear ke bawah," harapnya. *(*/fat/lus/laz/fj)*

Berkomitmen Dukung Peningkatan Pelayanan pada Masyarakat

Sambungan dari hal 1

Sementara pencabutan Perda Kota Yogyakarta No 10/2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, diharapkan memberikan layanan kesehatan bagi semua warga. Nantinya, semua penduduk baik kaya

atau miskin bisa mendapat pelayanan kesehatan gratis. Selama mau dirawat di kelas III dan tercatat belum sebagai peserta BPJS. "Jadi Pemkot melalui jaminan kesehatan ini akan berkoordinasi dengan Disdukcapil dan BPJS untuk memberi pelayanan," jabarnya.

Hadir dalam rapat paripurna, Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sumadi. Dia mengaku menerima banyak masukan terkait penyempurnaan manajemen peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. "Itu nanti akan kami tanggapi pada 17 Februari," katanya. *(*/fat/lus/laz/fj)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005